Pemkab Pasuruan Terus Berupaya Mencari Solusi Sengketa Tanah Kecamatan Nguling dan Lekok

Kamis, 14 Oktober 2021

Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus berupaya menyelesaikan sengketa tanah antara warga Desa Alas Tlogo dengan TNI AL. Upaya tersebut meliputi audiensi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM RI) untuk membahas perkembangan terkini penyelesaian sengketa. Audiensi ini dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, TNI AL, Polres Pasuruan, dan pihak terkait lainnya.

Rapat yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Rachmat Syarifuddin, menghasilkan catatan penting bahwa masalah agraria yang telah berlangsung lama perlu diselesaikan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah mengirimkan surat kepada pemerintah provinsi dan pusat untuk membantu menyelesaikan masalah ini.

Meskipun sengketa belum terselesaikan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan tetap mencukupi kebutuhan dasar warga Desa Alas Tlogo, seperti layanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur melalui Dana Desa. Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM, Gatot Ristanto, menyatakan bahwa KOMNAS HAM akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.

Pejabat dari ATR/BPN, M. Yusuf, menambahkan bahwa kasus ini merupakan kewenangan pemerintah pusat dan membutuhkan payung hukum yang jelas untuk menyelesaikan sengketa. Pihaknya telah mengikuti beberapa rapat sebelumnya dan telah ada beberapa poin hasil yang dicapai, termasuk dianggap selesainya sengketa Alas Tlogo.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap dengan upaya yang dilakukan, termasuk audiensi dengan KOMNAS HAM, sengketa tanah di Kecamatan Nguling dan Lekok dapat segera terselesaikan dengan adil dan merata.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.